**IMPLIMENTASIPEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSITERHADAP PENANAMAN KARAKTERSISWA MA NURUSSHALEH KATOL TIMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**AHMAD ALIMUDDIN**

**1723311002**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN**

**STKIP PGRI BANGKALAN**

**TAHUN 2021**

**IMPLIMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSITERHADAP PENANAMAN KARAKTERSISWA MA NURUSSHALEH KATOL TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepaa STKIP PGRI Bangkalan untuk Memenuhi Sebagian**

**Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi**

**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Ahmad Alimuddin**

**NPM. 1723311002**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**STKIP PGRI BANGKALAN**

**TAHUN 2020/2021**

# **PERSETUJUAN**

Skripsi oleh Ahmad Alimuddin, NPM 1723311002, dengan judul Implementasi Pendidikan antikorupsi Terhadap Penanman Karakter Siswa SMA Nurusshaleh Katol Timur

Tanggal

Pembimbing I

Dr. H. Sunarjo, SH,M.Hum

NIDN. 0712035201

Pembimbing II

Anindita Trinura Novitasari, M.Pd

NIDN. 0727117901

Tanggal

Mengetahui,

Ketua Prodi PPKN

Hefi Rusnita Dewi, S.P, M.Pd

NIDN.0712036905

# PENGESAHAN

Skripsi Oleh, Ahmad Alimuddin, NPM 1723311002 Dengan Judul Implementasi Pendidikan antikorupsi Terhadap Penanman Karakter Siswa SMA Nurusshaleh Katol Timur

Tim Penguji

Nama Tanda Tangan Jabatan

Ernawati, S.Psi, M.Pd ............................... Penguji 1

Dr. H. Sunarjo, SH,M.Hum ................................ Anggota/Pembimbing I

Mengetahui,

Ketua STKIP PGRI Bangkalan

Dr. Didik Hermanto, ST.,M.Pd

NIDN. 0731076504

# LEMBAR PERNYATAAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Alimuddin

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 Februari 1998

NPM : 1723311002

Program Studi : PPKN

Alamat : Dsn. Mandapah Timur Kc. Kokop

Nomor telepon/HP : 081246902019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

1. Skripsi yang diujikan ini adalah benar-benar hasil pikiran dan kerja saya sendiri (bukan hasil jiplakan baik sebagian ataupun seluruhnya)
2. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditentukan oleh program studi

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

 Bangkalan, 09 November 2021

Dosen Pembimbing I Yang Menyatakan,

Materai

Rp. 10000

Dr. H. Sunarjo, SH,M.Hum Ahmad Alimuddin

NIDN. 0712035201 NPM. 1723311002

# MOTTO

Siapkan Dirimu Untuk Masa Depanmu

# PERSEMBAHAN

Diri Saya:

Saya akan selalu berdoa & memperbaiki diri saya dengan selalu beribadah kepada Allah SWT, dan tidak akan pernah melalaikan perintahnya.

Orang tua:

Suatu kewajiban bagi saya agar selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan akan selalu menjaganya.

Dosen:

Terimakasih kepada seluruh dosen STKIP khususnya Dosen Prodi Ekonomi yang telah membimbing saya selama ini. Saya tidak bisa membalas semua kebaikannya hanya satu yang insyaAllah yang bias saya berikan yaitu Do’a terbaik untuk semua Dosen yang telah membimbing saya.

Teman:

Semua teman saya adalah orang baik saya sangat mempunyai teman yang telah mendukung dan menginpirasi untuk selalu belajar dan semangat khususnya kepada teman yang selalu memberika motivasi dan bantuan kepada saya.

Lingkungan:

Saya sudah belajar banyak dari lingkungan sekitar saya. Maka wajib hukumnya saya selalu berusaha tersenyum kepada teman dan lingkungan sekitar.

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, karunia, dan dengan ridho-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan antikorupsi Terhadap Penanman Karakter Siswa SMA Nurusshaleh Katol Timur

”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Bangkalan.

Dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan moril maupun materil, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Didik Hermanto, S.T., M. Pdselaku Ketua STKIP PGRI Bangkalan

 Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala kesempatan yang ada sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Setelah itu orang-orang yang penulis cintai adalah kedua orang tua saya, bapak Tamin beserta Ibu Purah yang tidak luput dari perannya do’a beliau dan sebagai penyemangat agar saya dapat lulus dengan tepat waktu dengan nilai terbaik. Dan teman-teman seperjuangan yang sedang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar di akhir nama, semoga lelah tidak membuat semangat kalian luntur. Mulai dari pengumpulan data dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

# ABSTRAK

Alimuddin, Ahmad.2021. *Implementasi Pendidikan antikorupsi Terhadap Penanman Karakter Siswa SMA Nurusshaleh Katol Timur*.Skripsi. Pendidikan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Bangkalan. Pembimbing ( I ) Sunarjo, S.H, M.Hum. Pembimbing ( II ) Anindita Trinura

Kata Kunci : *Implementasi Pendidikan antikorupsi Terhadap Penanman Karakter Siswa*

Penelitian ini adalah Penelitian Kualittif dengan mengunakan Strategi wawancara. Penelitian ini dilakukan di SMA Nurusshaleh Katol Timur Kelas X, hasil penelitian ini untuk mengetahui Implementasi pendidikan antikorupsi terhadap penanaman karakter siswa SMA Nurusshaleh Katol Timur.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Gambaran Umum SMA Nurusshaleh katol timur 1. Identitas Sekolah SMA Nurusshaleh katol timur terletak di Jalan Mandapah barat Katol Timur Kc.Kokop Kb. Bangkalan. Berdirinya SMA Nurusshaleh katol timur, merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat mengenai keberlangsungan pendidikan di kecamatan Kokop. Secara umum tujuan berdirinya SMA Nurusshaleh katol timur adalah untuk mengatasi disparitas pendidikan.

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan baik secara individu atau kelompok, mengambil yang bukan haknya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi dilakukan sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri sendiri tanpa perlu bertanggung jawab terhadap akan penderitaan rakyat. Banyak cara yang dilakukan Pemerintah menjadikan Indonesia yang bersih dari dan jujur dalam berbagai bidang, baik dalam hal kepemimpinan, pendidikan dan lain lain. Namun, untuk mewujudkan Indonesia yang jujur dan bersih dari tindakan korupsi tersebut menjadi agenda yang perlu perhatian dan usaha yang sangat panjang oleh para pemimpin yang sadar akan kejujuran dan bersih dari tindakan korupsi yang mengakar kuat sebagai budaya Indonesia.

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN ii](#_Toc92649448)

[PENGESAHAN iii](#_Toc92649449)

[LEMBAR PERNYATAAN iv](#_Toc92649450)

[MOTTO v](#_Toc92649451)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc92649452)

[KATA PENGANTAR vii](#_Toc92649453)

[ABSTRAK viii](#_Toc92649454)

[DAFTAR ISI ix](#_Toc92649455)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc92649456)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc92649457)

[B. Rumusan Masalah 4](#_Toc92649458)

[C. Tujuan Penelitian 4](#_Toc92649459)

[D. Manfaat Penelitian 4](#_Toc92649460)

[BAB II LANDASAN TEORI 6](#_Toc92649461)

[A. Deskripsi Teori 6](#_Toc92649462)

1. [Tinjauan Tentang Korupsi 6](#_Toc92649463)
2. [Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi 12](#_Toc92649464)
3. [Tinjauan Tentang Karakter 15](#_Toc92649465)

[B. Penelitian Terdahulu 20](#_Toc92649466)

[C. Kerangka Pikir 22](#_Toc92649467)

[D. Pertanyaan Penelitian 23](#_Toc92649468)

[BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN 24](#_Toc92649469)

[A. Pendekatan dan jenis Penelitian 24](#_Toc92649470)

[B. Tempat dan Waktu Penelitian 24](#_Toc92649471)

[C. Subyek Peneliti SMA Nurusshaleh 24](#_Toc92649472)

[D. Teknik Pengumpulan Data 25](#_Toc92649473)

[E. Instrumen penelitian 26](#_Toc92649474)

[F. Teknik Analisa Data 27](#_Toc92649475)

[G. Keabsahan Data 29](#_Toc92649476)

[H. Tahap-tahap Penelitian 29](#_Toc92649477)

[BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30](#_Toc92649478)

[F. Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Pada Masa Kini 41](#_Toc92649479)

[BAB VPENUTUP 53](#_Toc92649480)

[DAFTAR PUSTAKA 54](#_Toc92649481)

# BAB IPENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki tugas mulia untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang anti korupsi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat mungkin dan efektif apabila dilakukan dilembaga pendidikan dimana anak-anak masih berada dalam usia dini. Dalam masa ini, anak sedang berproses membentuk karakter (character building). Pendidikan anti korupsi dapat digunakan untuk menanaman kejujuran dan semangat tidak menyerah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan. Sikap anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Harapanya, setelah mereka dewasa (terutama jika menjadi pejabat) tidak akan menyelewengkan uang rakyat atau uang negara. Mereka tidak akan berlaku materialistik, hedonistik, ataupun melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji.

Pendidikan anti korupsi dapat dijadikan jembatan dalam mendidikan anak dan memperkenalkan tentang nilai nilai anti korupsi sejak dini, agr bduaya korupsi di Indonesia bisa diminimalisir sejak dini. Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, *pertama,* membentuk pengetahuan danpemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. *Kedua,* mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. *Ketiga,* membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Hakim, 2012).

Menurut Nuh (dalam Wibowo, 2012) program pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sebab, dengan begitu maka mereka akan terhindar dari berbagai macam sikap dan perilaku koruptif. Bahkan, ketika mendengar korupsi sudah alergi. Selanjutnya menurut Baho (dalam Wibowo, 2010) pendidikan antikorupsi bukan cuma berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan antikorupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis dan diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat. Fitra Aria (2018)

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013. Mata pelajaran ini tentu bermuatan materi yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Mengingat materi pendidikan antikorupsi belum berdiri sendiri sebagai mata pelajaran wajib. Sama halnya dengan pendidikan karakter bahwa walaupun belum menjadi mata pelajaran sendiri yang diajarkan dalam proses pembelajaran di sekolah, akan tetapi materi pendidikan antikorupsi dan materi pendidikan karakter harus diintegrasikan dengan materi-materi mata pelajaran lain, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan PPKn. Sejalan dengan hal tersebut tentu mata pelajaran PPKn cocok sebagai media transformasi ilmu-ilmu pada Pendidikan Antikorupsi dalam setiap pembelajaran di kelas.

PPKn merupakan mata pelajaran yang memuat nilai-nilai karakter kebangsaan. PPKn merupakan pendidikan yang berfungsi untuk membangun kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya membentuk identitas terhadap warga negara bagi suatu bangsa. Pembelajaran PPKn harus bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan *(civic competence)* untuk semua jenjang. Untuk itu agar pembelajaran efektif dan mampu membekali siswa dengan pengetahuan dan mencapai kemampuan dasar kewarganegaraan, maka dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan beberapa hal. *Pertama,* Kegiatan Pembelajaran PPKn disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik (guru), agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. *Kedua,* kegiatan pembelajaran PPKn memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. *Ketiga,* penentuan urutan kegiatan pembelajaran PPKn harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. *Keempat,* rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran PPKn minimal mengandung dua unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik.

Menurut Much. Arif Saiful Anam (2015) Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi pendidikan antikorupsi. Korupsi tidak lagi sebagai suatu fenomena tetapi sudah mengakar ke seluruh lapisan masyarakat.Oleh karenanya, pada saat ini diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk ikut serta berupaya memberantas, menghapus, atau minimalisir agar perilaku korupsi tidak semakin meluas dan mengakarnya.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (approach), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permissive to corruption.

Implementasi pendidikan antikorupsi di SMA Nurusshaleh Katol timur harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif guna tercapainya lingkungan yang bebas korupsi dan terbentuknya generasi yang anti korupsi. Dengan ini, tindak korupsi yang sudah membudaya tersebut dapat diminimalis.Adapun strategi pendidikan anti korupsi di SMA Nurusshaleh katol timur dapat dijalankan melaluipembiasaan perilaku yaitu melalui implementasi budaya anti korupsi.SMA Nurusshaleh Katol timur kokop bangkalan melakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi berupa implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PKn.

Mata pelajaran pendidikan pancasila merupakan mata pelajaran yang yang berpengaruh besar dalam pembentukan antikorupsi di kalangan siswa tingkat SMA Nurusshakeh melaui mata pelajaran pkn diharapkan perilaku antikorupsi siswa terbentuk sesuai dengan yang diharapkan agar kelak menjadi manusia yang jujur di dalam berperilaku. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang dilakukan sekolah bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan amanah, kerja keras, istikomah, ikhlas dan sabar sehingga menolak tindakan korupsi sejak di bangku sekolah. Namun pada kenyataannya di lingkungan SMA Nurusshaleh Katol timur kokop bangkalan masih ada siswa yang melakukan tindakan yang tidak jujur dalam berbagai hal antara lain: Siswa yang masih terlambat datang kesekolah, mencontek ketika ujian, saling menyalahkan antar teman dan lain sebagainya, sehingga peneliti tertatik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi pembelajaran pendidikan antikorupsi terhadap penanaman karakter siswa MA nurussholeh katol Timur".

## Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi terhadap penanaman karakter Siswa SMA Nurussholeh Katol Timur.
2. Apa hambatan dalam penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan pancasila SMA Nurusshaleh?

## Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi materi pendidikan antikorupsi dalam mencetak karakter Siswa SMA. Nurussholeh
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi dalam mencetak karakter siswa SMA. Nurussholeh

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
2. Penelitian ini menambah pengetahuan tentang penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan.
4. Sebagai sebuah karya ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta dunia pendidikan.
5. Untuk memperkaya pengetahuan seorang guru Pendidikan Aqidah Akhlak dalam penerapan nilai-nilai Pendidikan antikorupsi guna menciptakan siswa/siswi yang antikorupsi.
6. Secara praktis
7. Memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupi pada mata Pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMANurusshaleh Katol timur kokop bangkalan
8. Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap sekolah guna meningkatkan upaya penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.
9. Agar guru mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata Pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMA Nurusshaleh Katol timur kokop Bangkalan kepada peserta didik dengan baik.
10. Sebagai bahan rujukan guru untuk melakukan proses pembentukan siswa/siswa yang antikorupsi untuk generasi mendatang.

# BAB IILANDASAN TEORI

## Deskripsi Teori

### Tinjauan Tentang Korupsi

1. **Pengertian Korupsi**

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan baik secara individu atau kelompok,mengambil yang bukan haknya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi dilakukan sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri sendiri tanpa perlu bertanggung jawab terhadap akan penderitaan rakyat. Banyak cara yang dilakukan Pemerintah menjadikan Indonesia yang bersih dari dan jujur dalam berbagai bidang, baik dalam hal kepemimpinan, pendidikan dan lain lain. Namun, untuk mewujudkan Indonesia yang jujur dan bersih dari tindakan korupsi tersebut menjadi agenda yang perlu perhatian dan usaha yang sangat panjang oleh para pemimpin yang sadar akan kejujuran dan bersih dari tindakan korupsi yang mengakar kuat sebagai budaya Indonesia.

Menurut Shulchan Yashin (1997) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan penerimaan suap, memanfatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah. Setelah maraknya kasus –kasus korupsi yang terjadi Belakang ini, Pemerintah melakukan pembaharuan pendidikan guna menjawab setiap permasalahan kehidupan manusia. Berbagai faktor serta aspek penyelenggaraan pendidikan telah digarap oleh para ahli demi kemajuan pendidikan dan masyarakat.

Korupsi di Indonesia bagaikan sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan sudah menjadi sebuah permasalahan yang rumit. Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan tindakan pemberantasan, namun juga perlu diadakan pencegahan agar tindak pidana korupsi jangan sampai terjadi lagi.Salah satu upaya yang dilakukan dalam mencegah berkembangnya tindakan korupsi adalah dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan di sekolah.

Upaya menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi guna mencegah perilaku korupsi di lingkungan sekolah, yang jika tidak ditanamkan sejak di Sekolah, maka kelak akanberdampak besar ketika peserta didik menjadi seorang pemimpin. Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan karena pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban, memiliki kemampuan, keterampilan, etos dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat.

Kasus-kasus korupsi yang terus terjadi, diharapkan munculnya wacana dan kesadaran moral untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penanaman nalar dan nilai-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam upaya membangun sikap antikorupsi.

Nilai-nilai yang diterapkan bentujuan membentuk pribadi yang bersih dan jujur dalam masyarakat dan menjadi seorang pemimpin yang terhindar dari perbuatan korupsi. Namun pada kenyataanya nilai-nilai tesebut belum mampu sepenuhnya menciptakan pemimpin yang berjiwa jujur, terbukti dengan masih banyaknya terungkap kasus-kasus korupsi. Korupsi merupakan permasalahan mendasar yang terjadi, dilakukan baik secara individu atau kelompok, mengambil yang bukan hak nya denga tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

1. **Bentuk-Bentuk Korupsi**

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
3. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
5. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18):

1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.
5. Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Jeremy Pope (2007: xxvi) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam Toward a General Theory of Official Corruption menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemrintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.
20. **Faktor Penyebab Tindakan Korupsi**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu aspek perilaku individu, aspek organisasi kepemerintahan, aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan (Bahri, 2008).

1. Aspek individu dan perilaku adalah penyebab korupsi yang berasal dari sikap mental seseorang yang berupa dorongan dari dalam dirinya.
2. Aspek organisasi kepemerintahan adalah penyebab korupsi yang berasal dari buruknya sistem organisasi kepemerintahan termasuk sistem birokrasinya.
3. Aspek perundang-undangan adalah penyebab korupsi yang berasal dari lemahnya sistem perundang-undangan yang ada.
4. Aspek pengawasan adalah penyebab korupsi karena minimnya atau bahkan tidak adanya pengawasan baik oleh pihak internal maupun eksternal.
5. **Dampak Korupsi**

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Dampak korupsi yang lain bisa berupa:

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegetimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan the rule of law. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan (Santoso, 2011).

### Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi

1. **Pengertian Pendidikan Anti Korupsi**

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Siswoyo dkk. (2007: 18) yang dinamakan pendidikan yaitu: Tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggitingginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituliskan oleh Siswoyo dkk. (2007: 19) pengertian pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Korupsi menurut Danang (2012: 125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Chablullah Wibisono (2011: 22) Pengertian korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilainilai anti korupsi. Muhamad Nuh (2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sedangkan menurut Haryono Umar (2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) tujuan pendidikan antikorupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi.

1. **Tujuan Pendidikan Anti Korupsi**

Menurut Dharma 2004 secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah :

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek – aspeknya.
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi.
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi.

Manfaat jangka panjangnya dapat menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi Nasional dan program anti korupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi Kesuma, 2004. Sedangkan menurut Arbain 2014 : 13, tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan anti korupsi di sekolah adalah untuk menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga sekolah. Penanaman nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga sekolah merupakan tujuan utama dalam menerapkan pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Dengan penanaman nilai dan sikap kepada warga sekolah, secara sadar telah mengajak warga sekolah untuk dapat menjadikan sekolah sebagai wadah penanaman nilai – nilai kebaikan dalam diri pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan serta warga sekolah secara menyeluruh. Dengan adanya penanaman nilai dan sikap anti korupsi di lingkungan warga sekolah dan menjadikan warga sekolah anti terhadap korupsi maka tujuan pendidikan anti korupsi dapat terwujud.

1. **Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi**

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang di impelementasikan pada kegiatan pembelajaran yakni merujuk dari teori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 9 (sembilan) nilai-nilai pendidikan antikorupsi diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kemudian merujuk dari teori Puspito dkk (2011), Terdapat 9 (sembilan) nilai-nilai antikorupsi yang sangat penting untuk ditanamkan, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

1. Kejuuran
2. Kepedulian
3. Kemandirian
4. Kedisiplinan
5. Tanggung Jawab
6. Kerja Keras
7. Kesederhanaan
8. Keberanian
9. Keadilan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Nilai | Deskripsi |
| 1. | Kejujuran | Perilaku yang didasari pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan,tindakan dan pekerjaan  |
| 2. | Kepedulian | Sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan |
| 3. | Kemandirian | Sikap dan prilaku yang tidak mudah pada orang lain dalam menyesesaikan tugas-tugas |
| 4. | Kedisiplinan | Tindakan yang menunjukan prilaku tertip dan patuh pada perbagian ketentuan dan peraturan |
| 5. | Tanggung jawab | Sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri masyarakat, lingkugan (alam sosial budaya). Negara dan tuhan yang maha esa |
| 6. | Kerja keras |  |
| 7. | Kesederhanaan |  |
| 8. | Keberanian |  |
| 9. | Keadilan |  |

1. **Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi**

Setiap Perguruan Tinggi diharapkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai tahun akademik baru 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan. Dengan demikian, mahasiswa baru tahun ini menjadi kelinci percobaan dari sebuah kebijakan. Semoga itu bukan kebijakan dadakan atau instan. Kebijakan Kemdikbud tersebut turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun materi kuliahnya. Langkah pun sudah dimulai dengan kegiatan Training of Trainers (TOT) Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2012. Pesertanya adalah 1007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, 92 PTN dan 434 PTS diharapkan mengimplementasikannya pada tahun akademik baru.

### Tinjauan Tentang Karakter

1. **Pengertian Karakter**

Karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang dengannya membentuk karakter psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Berbagai definisi istilah dari karakter itu sendiri para tokoh dan ulama telah menjelaskannya, diantaranya adalah sebagai berikut: Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" (menandai) dan memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara seoarang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitanya dengan personality (kepribadian) seseorang. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (a person of character) apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun yang dimaksud berkarakteradalah berkepribadian, beperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Sebagian menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas moral dan mental, sementara yang lainya menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya mengubah atau membentuk karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap intelektual seseorang. Coon mendefinisikan karakter sebagai suatu penilain subjektif terhadap kepribadiaan seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadiaan yang dapat atau tidak dapat di terima oleh masyarakat. Karakter berarti tabiat atau kepribadian. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah di kuasai secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Dalam tulisan bertajuk Urgensi Pendidikan Karakter, Prof. Suyanto, Ph.D. menjelaskan bahwa "karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara". Dalam istilah psikologi, yang disebut karakter adalah watak perangai sifat dasar yang khas satu sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi.

1. **Bentuk-Bentuk Karakter**

Ada tiga komponen karakter yang baik (components of good character) yang dikemukakan oleh Lickona, sebagai berikut:

1. Pengetahuan Moral Pengetahuan moral merupakan hal yang penting untuk diajarkan. Keenam aspek berikut ini merupakan aspek yang menonjol sebagai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan.
2. Perasaan Moral Sifat emosional karakter telah diabaikan dalam pembahasan pendidikan moral, namun di sisi ini sangatlah penting. Hanya mengetahui apa yang benar bukan merupakan jaminan di dalam hal melakukan tindakan yang baik. Terdapat enam aspek yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter.
3. Tindakan Moral Tindakan moral merupakan hasil atau outcome dari dua bagian karakter lainnya. Apabila orang-orang memiliki kualitas moral kecerdasan dan emosi maka mereka mungkin melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka rasa benar. Tindakan moral terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut.
4. **Faktor Penyebab Karakter**
5. Faktor-Faktor Eksternal

Faktor eksternal dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Menurut Firdaus (2012:401) lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan anak yang pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak pertama kali memperoleh pendidikan dan bimbingan. Dikatakan utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah dalam keluarga. Lingkungan keluarga sebagai salah satu faktor penentu yang berpengaruh dalam perkembangan pribadi anak, dapat dibagi lagi menjadi tiga aspek, yaitu: (a) kondisi ekonomi keluarga, (b) kerekatan orang tua dan anak, serta (c) pola asuh/cara orang tua mendidik anak (Ormrod, 2008:94-95). Lingkungan prakerin merupakan lingkungan kerja, sedangkan pekerjaan dapat berbentuk situasi dan kondisi pekerjaan, macam, jenis, dan tingkatan pekerjaan (Sedarmayanti, 2003:1). Lebih lanjut Ahyari (1999:124) menyebutkan ada dua faktor pembentuk lingkungan kerja yaitu faktor fisik dan faktor psikososial (nonfisik). Di dalam faktor fisik terdiri dari mesin, gedung, peralatan kantor, dan sebagainya. Sedangkan faktor lain yang bersifat nonfisik bisa berwujud manusia yang ada dalam organisasi tersebut terutama dalam hubungan atau interaksinya. Dengan kata lain, dalam lingkungan kerja terdapat hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan mesin, manusia dengan kendaraan.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor pendukung/penghambat yang berasal dari dalam diri individu. Salah satu faktor internal yang erat kaitannya dengan kepribadian/karakter awal siswa adalah soft skill. Soft skill pada dasarnya merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal (Muqowim, 2012:6). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh negara Inggris, Amerika dan Kanada, ada 23 atribut soft skill yaitu: inisiatif, Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015 ISBN 978-602-73690-3-0 31 Universitas PGRI Yogyakarta etika/integritas, berfikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres, manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, berkoperasi, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumentasi logis, dan manajemen waktu (Neff dan Citrin, 2001:18).

1. **Dampak Karakter**
2. Mengenali identitas diri

Dalam pendidikan karakter siswa dapat mengenali siapa diri kita yang sebenarnya, dengan begitu kita mengetahui apa fungsi kita, misalkan di identitas kita sebagai pelajar maka yang harus kita lakukan adalah belajar.

1. Menunjang kreatifitas

Dengan adanya pendidikan karakter kita dapat mengasah kreativitas seseorang agar menjadi lebih baik lagi, karena lreativitas merupakan hal yang positif jika hal tersebut dapat terus ditingkatkan, kreativitas seseorang tentu berbeda-beda tergantung bagaimana hobinya, dengan mengasah hobi yang dimiliki seseorang tentu akan menimbulkan kreativitas yang lebih besar lagi, dan jika ada permasalahan yang timbul maka akan cepat diatasinya.

1. Membentuk sifat yang baik

Pendidikan karakter juga berperan dalam membentuk sifat pada siswa, terutama pada segi etika dan moral, etika seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan karakter akan cenderung negatif, terlebih faktor lingkungan sekitar yang selalu berperan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya pendidikan karakter maka akan memberikan batasan-batasan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang buruk, pendidikan karakter ini lah yang akan memfilter aktvitas seseorang.

1. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain untuk membantu dalam kehidupan sehari-harinya, dengan meningkatnya kepedulian terhadap sesama akan memberikan dampak yang positif dari diri seseorang tersebut, meningkatkan kepedulian terhadap sesama bisa dilakukan dengan sedekah, bergotong-royong antar RT dan RW setempat, sehingga mereka bisa mengenal kita sebagai pribadi yang memiliki kepedulian.

1. Membangun sifat kepemimpinan

Sifat kepemimpinan seseorang selalu berbeda-beda tingkatan, hal ini bisa kita lihat ketika dia mengambil suatu keputusan. Agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. Maka sifat kepemimpinan harus dibangun. Dengan adanya pendidikan karakter ini akan mengajarkan seseorang untuk melatih sifat kepemimpinannya. Dengan begitu segala hal yang diputuskan akan memberikan hal yang positif.

## Penelitian Terdahulu

Beberapa Jurnal penelitan yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi yang peneliti kumpulkan antara lain:

1. Luthfiyani Siswanti, Aslich Maulana (2015) “ Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan pendidikan pancasila dan kewarganeraraan di SMANurusshaleh Katol Timur “Hasil penelitian menunjukkan: nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diSMANurusshaleh Katol Timuradalah kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran dilakukan dengan menekan nilai-nilai tersebut ketika menjelaskan muatan Pendidikan pancasila, memberikan wawasan terkait materi-materi antikorupsi kepada peserta didik di sela-sela materi pembelajaran sebagai pengantar yang bersifat hidden curriculum (kurikulum tersembunyi), sehingga termasuk di dalamnya adalah nilai keteladanan, sikap dan pembiasaan. Kendala dalam penelitian ini yakni cara menertibkan dan memahamkan peserta didik secara keseluruhan tentang pembelajaran yang diajarkan dan solusinya guru harus memahamkan berkali-kali dan menyadarkan peserta didik yang bandel di kelas, karena menyepelekan pelajaran ( journal.umg.ac.id di akses april 2021).
2. Penelitian Sutrisno (2017) Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di Sekolah Menengah Atas.Implementasi Materi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn biasa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pertama mengembangkan kurikulum pembelajaran PPKn hal ini bisa disisipkan melalui materi sistem hukum dan peradilan nasional. Proses pembelajaran Pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn bisa dilakukan dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari media, model project citizen dan bahan referensi lain baik, internet study lapangan maupun sumber kajian lain. Kedua Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen akan menjadi dasar keilmuan yang bisa mewujudkan generasi yang memiliki sikap antikorupsi yang tinggi kritis dalam menyingkapi berbagai kasus korupsi. Penerapan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal ketiga Penerapan proses pembelajaran menggunakan model project citizen peserta didik diarahkan untuk mengkaji berbagai masalah tentang korupsi.. Nilai-nilai dasar dari pendidikan antikorupsi akan dipahami secara langsung oleh peserta didik manakala melalui proses pembelajaran dengan model project citizen adapun nilai yang akan dicapai oleh peserta didik terdiri dari nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan (https://journal.uny.ac.id diakses 15 April 2021).
3. Natal Krisni (20180) Penanaman Nilai Antikoorupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNESMelalui Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan perkuliahan pendidikan antikorupsi. Metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan angket/kuesioner. Salah satu indikator keberhasilan, yaitu setelah mengikuti pendidikan antikorupsi siswa mampu pendidikan antikorupsi antara lain mengetahui bahaya dari tindak pidana korupsi. dapat mengerti nilai-nilai antikorupsi. perubahan karakter. Faktor penunjung keberhasilan pendidikan antikorupsi yaitu Faktor kesadaran dalam diri sendiri, media dan sumber belajar dan pemilihan strategi yang tepat. Faktor yang menghambatkebarhasilan pendidikan antikorupsi yaitu faktor lingkungan dan kesalahan dalam memilih media dan strategi belajar (https://jurnal.umk.ac.id diakses 20 april 2021).
4. Ade Imelda Frimayanti (2017) Konsep Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam.Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan dari anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak dikenalkan oleh nilai-nilai antikorupsi. Penanaman dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sikap kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pendidikan antikorupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Konsep antikorupsi dengan membiasakan hidup antikorupsi, melalui pengenalan gaya hidup anti korupsi, akibat korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri peserta didik. Implikasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan agama Islam yaitu kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai antikorupsi, pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan dan guru harus mampu menjadi teladan, memberikan tentang bahaya korupsi, dan membiasakan siswa untuk anti korupsi (https://www.researchgate.net diakses 20 April 2021).

## Kerangka Pikir

Implimentasi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penanaman KarakterSiswa Ma Nurusshaleh Katol Timur

Menerapkan Sikap Tanggung Jawab

Memberikan Pengaruh Berfikir Postif Siswa

## Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi terhadap penanaman karakter Siswa SMA Nurussholeh Katol Timur.
2. Apa hambatan dalam penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan pancasila SMA Nurusshaleh?

# BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan dan jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode diskriptif adalah penelitian untuk membuat pencadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di lapangan yang diteliti (Suryabrata, 2003).

Desain deskriptif ini digunakan untuk menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada, dengan pola survey, case-stydy, causal comparative, corelational, dan developmental (Kasiram, 2008).

Penelitian ini dikonsentrasikan untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dan dapat mengkomunikasikan lebih dari yang dapat dikatakan dengan bahasa yang proposional.

## Tempat dan Waktu Penelitian

 Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah SMA NURUSSHALEH Katol Timur,Kokop,Bangkalan. Sedangkan waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan mei 2021 sampai dengan selesai.

## Subyek Peneliti SMA Nurusshaleh

 Dalam penelitian, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat bantu dan dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi lokasi penelitian dan terjun langsung dalam mengikuti aktivitas akademika di sekolah.

## Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara holistik integrative (penyajian data secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan atau mengaitkan data yang terbaru dan telah ada sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah) secara relevan dengan fokus, maka teknik pengumpulan data yang akan dipakai meliputi:

1. Metode Observasi

Menurut Indriantoro dan Supomo dalam Ruslan (2010), observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati pola perilaku subyek (orang), obyek (benda-benda), atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya sebagai penonton tidak sebagai pemain, tujuannya untuk memperoleh gambaran umum tentang implementasi materi PKn dalam pembentukan karakter siswa

1. Metode Interview

Interview atau wawancara yaitu suatu kegiatan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010:). Metode ini ditujukan untuk memperoleh data tentang Implementasi pembelajaran pendidikan antikorupsi terhadap penanaman karakter siswa***S***MA Nurussholeh katol.

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010). Dokumen dalam metode ini berupa keadaan geografis sekolah, foto kegiatan belajar di sekolah, foto kegiatan ekstrakurikuler, struktur organisasi dan prestasi yang diperoleh SMA Nurussholeh Katol Timur. Metode ini diperlukan sebagai metode bantu dalam mengumpulkan data tentang implementasi materi PKn di SMA Nurussholeh Katol Timur.

1. Analisis Data

Analisis data dalam deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Arikunto, 1995). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis tersebut selanjutnya dilengkapi dengan data pendukung kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2010). Data yang terkumpul begitu banyak dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, serta dokumen berupa soft file dan hard file. Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dianalisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.

## Instrumen penelitian

Menurut Sugiyono (2015) dalam ranah studi kualitatifinstrument penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument wajib “divalidasi” .Validasi mengenai peneliti sebagai alat meliputi validasi mengenai pemahaman metode studi kualitatif, penguasaan pengetahuan mengenai aspek yang diuji, baik secara akademik maupun logistiknyakesiapan peneliti untuk terjun kedalam objek peneliti. Validasi dilaksanakan oleh peneliti sendiri, melalui penilaian diri seberapa jauh pengetahuan mengenai metode kualitatif, teori dan wawasan terhadap bidang yang diuji, dan kesiapan dan bekal terjun ke lapangan. Dalam penulisan penelitian ini, penulismemakai alat pengumpul data yaitu:

1. Studi Pustaka Studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang dimanfaatkan untuk melaksanakan pencarian kepustakaan (library research) agar datadan informasidapat diperoleh dengan karangan ilmiah/ buku pendapat sarjana dan juga aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.
2. Wawancara merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih atau antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh pengetahuan atau informasi dari narasumber yang diyakini. Wawancara dilaksanakan dengan cara penyampaian sejumlah question dari pewawancara terhadap narasumber. Metode pengumpulan data yang laksanakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu yang akan ditanyakan sudah terstruktur sebelumnya secara detail yang memuat informasi tentang hal yang berkaitan dengan pokok persoalan.
3. Kuesioner (Angket) Kuesioner (angket) merupakan proses pengumpulan data yang direalisasikan dengan memberi questiontertulis kepada narasumber untuk dijawabnya. Penelitian ini menggunakan angket untuk menguatkan hasil wawancara .

**Table 3.2**

**Kisi-Kisi Angket**

Menurut Sugiono (2016) untuk alternative jawaban dalam angket ini di tetapkan skor yang diberikan untuk masing-masing pilihan dengan menggunakan modifikasi skala riset. Dengan demikian dalam penelitian ini responden dalam menjawab pertanyaan ada 4 kategori diantaranya sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS), dari jawaban diatas memiliki bobot skor dengan rincian sebagai berikut :

Sangat setuju :4

 Setuju : 3

 Tidak setuju : 2

Sangat tidak setuju: 5

## Teknik Analisa Data

Menurut Lofland dan Kofland dalam Moleong (2009) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengamati dan mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang implementasi materipendidikan pendidikan antikorupsi dalam mencetak karakter Siswa SMA. Nurusshaleh serta hambatan-hambatan dalam penanaman karatkter tersebut. Adapun sumber data langsung peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, WAKA kurikulum, WAKA Kesiswaan, guru PKn, guru BK, wali kelas, siswa, serta pengamatan.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan dari dokomentasi. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan dan sebagai pelengkap informasi yang telah terkumpul melalui wawancara dan pengamatan adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengamati dan mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang implementasi materipendidikan pendidikan antikorupsi dalam mencetak karakter Siswa SMA. Nurusshaleh serta hambatan-hambatan dalam penanaman karatkter tersebut. Adapun sumber data langsung peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, WAKA kurikulum, WAKA Kesiswaan, guru PKn, guru BK, wali kelas, siswa, serta pengamatan.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan dari dokomentasi. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan dan sebagai pelengkap informasi yang telah terkumpul melalui wawancara dan pengamatan.

## Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2010).

## Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan Tahapan ini ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan, yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian (Moleong, 2009).
2. Tahap Pekerjaan Lapangan Tahap ini peneliti harus memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta dalam mengumpulkan data (Kasiram, 2010).
3. Tahap Analisis Data Menurut Patton dalam Kasiram (2010) tahap analisis data adalah proses mengatur urutan data,engorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

**BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Gambaran Umum SMA Nurusshaleh katol timur 1. Identitas Sekolah SMA Nurusshaleh katol timur terletak di Jalan Mandapah barat Katol Timur Kc. Kokop Kb. Bangkalan. Berdirinya SMA Nurusshaleh katol timur, merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat mengenai keberlangsungan pendidikan di kecamatan Kokop. Secara umum tujuan berdirinya SMA Nurusshaleh katol timur adalah untuk mengatasi disparitas pendidikan.Dalam pengembangannya ada beberapa tahapan, pertama, pembangunan gedung selesai pada tahun 1987, periode kedua tahun 1988, periode ketiga tahun 2009 dan periode keempat tahun 20010 Barulah pada tahun 2011SMA Nurusshaleh katol timur merancang Visi dan Misi yang lebih tertata melakukan pengembangan menuju kwalitas terpadu dengan membangun kelas – kelas khusus yang menuntut pengadaan sarana dan prasarana plus, diantaranya usaha – usaha penataaan guru, penataan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta perangkat pembelajaran lainnya. Adapun identitas dari sekolah ini antara lain :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama Sekolah | :SMA Nurusshaleh Katol Timur |
| 2. | NSS/NDS/NPSN | : 20573137/302052910001/301001 |
| 3. | Alamat Sekolah | : Mandapa Timur Katol Timur |
|  | 1. Jalan
 | : H. ZIYADY ALIMUDDIN NOMOR :09 |
|  | 1. Kelurahan/desa
 | : Katol Timur |
|  | 1. Kecamatan
 | : Kokop |
|  | 1. Kabupaten/kota
 | : Bangkalan |
|  | 1. Provesi
 | : Jawa Timur |
|  | 1. Kode pos
 | : 69155 |
|  | 1. Nomor telfon
 | : |
|  | 1. Fax
 | : |
|  | 1. Email
 | :smanurrusshaleh@gmail.com |
|  | J. Letak Geografi sekolah | : pedesaan |
| 4. | Akreditasi  | : A Akademik |
| 5. | SK Pendirian sekolah | : |
| 6. | Sub Rayon | : Sekolah  |
| 7. | Nama Kepala Sekolah | : SMA Nurusshaleh |
| 8. | Nomor Handphon | : |
| 9. | Katagori Sekolah | : |
| 10. | Tahun Didirikan | : 2009 |
| 11. | Kepemilikan Tanah | : Yayasan |
| 12. | Bagunan Sekolah | : Milik Sendiri |
| 13. | Luas Tanah/setatus | : 2318 m2 |
| 14. | Luas bagunan seluruhnya | : 1300 m2 |
| 15. | Kegitan belajar mengajar | : Pagi hingga Siang hari |

16. Rombogan Belajar: 30 orang

17. sekolah ini melaksanakan manajemin berbasis sekolah

**2.** Visi dan Misi Sekolah

 A. Visi sekolah

menjadikan SMA nurusshaleh Sebagai lembaga pendidikan bermutu berorientasi imtaq dan iptek, berakhlaqul karimah, cakap, terampil, serta berwawasan golobal.

B. Misi sekolah

1. Melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk mengembagkan daya piker secara optimal.
2. Melaksanakan pegayaan untuk mempersiapkan siswa yang unggu dalan kompotesi akademik.
3. Melaksanakan ibadah dan keagamaan lainnya sesuai dengan agama yang di anut peserta didik.
4. Mendidik siswa berbudaya local Madura untuk memperkuat budaya nasional serta memiliki daya saing Global.
5. Menumbuhkan dan mengembagkan pola piker dan tindakan yang mencerminkan budaya mutu dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari hari.
6. Melaksanakan pelaksanaan berbagai bidang olahraga sehingga siswa memiliki daya fisik yang sehat dan tangguh.
7. Menyeleggarakan dan menfasilitasi kegiatan yang mencerminkan pengembagan seni budaya Bangsa.
8. Melaksanakan pembinaan KIR yang kreatif, mandiri dan kompetetif.
9. Melaksanakan pendidikan dan kecakapan hidup guna menciptakan insan yang relegius, mandiri, kreatif, dan kompetetif.
10. **Deskripsi Hasil Penelitian**

untuk mengetahui apakah guru memiliki peran dalam menanamkan nilai anti korupsi melalui mata pelajaran PPKn di SMA Nurusshaleh Katol Timur, maka penulis melakukan wawancara terstruktur dan juga memberikan angket. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak SA’RAN, S.SOS selaku kepala kelas dan juga guru mata pelajaran PPKn. Adapun hasil dari wawancara, yakini :

1. Seberapa pentingkah guru menanamkan nilai anti korupsi kepada siswa ?

Jawab :

Amat penting, karena korupsi dapat menghancurkan dan merusak tatanan negara, bisa menghancurkan sistem demokrasi, memundurkan atau menganjlokkan pembangunan, merugikan keuangan negara, menghancurkan dan merusak sumber daya terkait kemanusian, dan bisa menyebabkan sebuah negara menjadi negara yang paling miskin.

Karena itu dibutuhkannya tenaga pendidik atau guru untuk menyadarkan ataumenanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa sehingga mereka memahamidan bisa menafsirkan bahwa korupsi bisa merusak danmenghancurkan segala aspek kehidupan.

1. Strategi apa yang dilakukan oleh guru untuk menanamkan nilai anti korupsi?

Jawab:Strategi untuk menanamkan nilai anti korupsi yaitu ada tiga (3), yatu *project citizen*, integrasi, dan pastisipatif. dengan cara menanamkan nilai kejujuran,tanggung jawab, kedisiplinan, kesederhanaan, kemandirian, kerja keras, keberanian, keadilan,dan yang terakhir kepedulian. Karena memang ke sembilan nilai yang disebutkan tadi itu adalah nilai-nilai anti korupsi.

1. Bagaimana caranya pengintegrasian nilai anti korupsi kedalam mata pelajaran PPKn ?

Jawab :

Pada prinsifnya mengintegrasikan nilai anti korupsi bisa direalisasikan dengan memperdalam dan memperluas materi, metode atau cara, dan sumber belajar atau media belajar. Pengintegrasian melalui mata pelajaran PPKn pada hakikatnya memang hampir keseluruhan materinya terdiri dari nilai perilaku anti korupsi sehingga mudah dan gampangmengintegrasikannya kedalam mata pelajaran PPKn.

Integrasi melalui pengembangan metode direliasasikan dengan memilih dan memanfaatkan metode pembelajaran yang bisa mewujudkan terjadinya

internalisasi nilai dan berkembangnya sikap dan perilaku anti korupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kesederhanaan, kemandirian, kerja keras dan sebagainya. Beberapa strategi atau metode seperti kerja kelompok (diskusi), demonstrasi, simulasi, berargumentasi, dan sebaginya harus didesain dengan jalan cerita yang dapat mewujudkan terjadinya proses internalisasi nilai dan berkembang dan tumbuhnya sikap anti korupsi pada siswa.

1. Pembahasan

Proses pembelajaran ppkn tentu perlu di lakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Pola pembembelajaran yang sistematis dan terukur akan mengembagkan kompetensi ke ilmuan pada pesera didik.

Proses trasformasi nilai-nilai keilmuan pada peserta didik menjadi tolak ukur ketercapaiyan tujuan pembelajaran yang akan di capai. Implementasi pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Ppkn mengunakan mudel pembelajaran prjek ctizen bisa dilakukan melalui beerapa tahapan.

Implementasi materi pendidikan anti korupsi pada mata pelajran ppkn. Proses pemimplementasin materi pendidikan anti korupsi harus mebuat beberapa unsur proses pelaksanaan hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yakni penyembgan kurikulum pembelajaran ppkn.

Muatan materi yang di kembagkan dalam proses pembelajaran ppkn terdiri sistem hukum dan peradilan nasional yang di ajarkan pada materi ppkn pada kelas X. Melalui materi ini dapat disisipkan materi tentang pengertian tindak pidana korupsi dengan tujuan peserta ddik mampu memhami arti kata dan devenisi korupsi secara tepat dn benar, peserta didik mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di indonesia dengan benar serta peserta didik mampu menjelaskan bentuk bentuk korupsi.

Sdangkan materi selanjutkan yang perlu di sampaikan pada peserta didik terdiri dari materi yang perhubugan dengan upaya dan peran serta pemberantasan korupsi dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu pemjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi, peserta didik mempu menjelaskan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi kedlam kehidupan sehari peserta didik mampu memahami nilai-nilai anti korupsi.

Melalui pembelajaran pendidikan antikorupsi pada peserta didik akan memberikan kontribusi lebih dalam mengembagkan nilai-nilai atau sikap anti koorupsi pada peserta didik. Muatan materi pembelajaran pendidikan antikorupsi pada pembeljaran ppkn dilakukan melaui beberapa hal salah satunya menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, pengertian tindak pidana korupsi sampai dengan kedua, upaya dan peran serta dalam pemberantasan korupsi.

Kedua materi ini di sampaikan pada pertemuan pertama dengan durasi 2 kali 45 menit.Hal ini bertujuan agar para peserta didik bisa menyerap berbagai masalah dan pemahaman mendasar tentang korupsi secara umum, sehingga dalam pertemuan kedua nanti peserta didik akan disodorkan berbagai masalah tentang korupsi untuk bisa diselesaikan melalui model pembelajaran *project citizen.* Dengan harapan peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan Ilmu dalam materi pendidikan antikorupsi kedalam solusi dari masalah korupsi yang terjadi.

Pada dasarnya proses pengimplementasian materi-materi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn sudah dikembangkan secara umum dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Hal ini mengingat bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan lembaga sekolah khususnya guru mata pelajaran PPKn yakni bagai mana nilai-nilai konsep dasar dalam materi antikorupsi bisa dikembangkan dalam beberapa hal baik pengembangan kurikulum pembelajaran PPKn yang memuat materi pendidikan antikorupsi maupun proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga masing-masing komponen dalam pembelajaran bisa disatukan secara menyeluruh dalam perangkat pembelajaran. Tujuan akhir dari proses pembelajaran ini yakni menyiapkan para generasi muda yang berjiwa global yakni warganegara global yang akan berfikir secara luas dalam penanggulangan korupsi. kewarganegaraan global akan menumbuhkan karakter generasi muda yang berfikir kritis tentang isu-isu global untuk bisa mengeksplorasi, mengembangkan dan mengekspresikan nilainilai dan pendapat mereka sendiri (Zahabioun, Yousefy, Yarmohammadian, & Keshtiaray, 2013, p. 199).

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn Berbasis *Project Citizen* merupakan model pembelajaran yang berbasis pada masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan yang mendorong adanya tingkat partisipasi warga negara dalam sistem pemerintahan.

Ada beberapa tahapan dalam proses pembelajaran menggunakan *project citizen* setelah peserta didik memahami materi pada pertemuan kedua peserta didik diarahkan untuk dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, terdiri dari 4 siswa. Masing-masing kelompok kecil diberikan tugas untuk mencari informasi tentang masalah yang ada di sekitar. Kemudian Siswa melakukan identifikasi masalah dalam kehidupan seharihari melalui diskusi dalam kelas, bertanya/wawancara kepada orang tua/keluarga, membaca koran baik cetak maupun online, mendengarkan berita maupun menonton TV, mencari sumber informasi melalui internet. Dalam hal ini penelitian mengambil contoh tema besar tentang kurangnya transparansi biaya sekolah yang diambil secara demokrasi dari berbagai masalah yang paling penting untuk diselesaikan.

Setelah itu peserta didik dibagi menjadi lima kelompok. Empat kelompok untuk panel besar dan satu kelompok untuk bagian dokumentasi. Kelima kelompok itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelompok 1 bertugas menjelaskan masalah yang akan dibahas, kelompok 2 yang mengevaluasi kebijakan alternatif, kelompok 3 yang mengembangkan solusi sebagai kebijakan kelas, kelompok 4 mengembangkan rencana tindakan. Kelompok kelima bertanggung jawab bagian dokumentasi. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Setelah terkumpul data-data dari masing-masing kelompok kemudian peserta didik menyusun panel portofolio dan dokumen. Kemudian dipresentasikan secara umum di dalam kelas sesuai dengan kajian tugas kelompok.

Melalui pembelajaran *project citizen* dalam pelajaran PPKn akan mengembang sifat dan nilai-nilai sikap antikorupsi pada peserta didik. Salah satu nilai yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn yakni sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai ini bisa di rasakan secara langsung manakala peserta didik mengikuti setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Melalui proses pembelajaran ini peserta didik lebih kreatif dan berinovasi dalam mengembangkan setiap muatan materi pendidikan antikorupsi yang kemudian akan menjadi dasar bersikap dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah keluarga dan masyarakat.

Pengimplementasian pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PPKn tentu akan menghasilkan sikap dan kepribadian peserta didik yang berkemajuan guna menyelesaikan setiap permasalahan tentang berbagai korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pendidikan antikorupsi yang diajarkan dalam jenjang sekolah menengah atas khususnya kelas X akan menjadi dasar keilmuan antikorupsi pada masa yang akan datang yang menonjolkan sikap-sikap antikorupsi. Implementasi ini akan menjadi rujukan bagi para guru untuk mengembankan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di SMA Nurusshaleh yang didasarkan pada dua konsep yakni proses pembelajaran berbasis *project citizen* dengan langkah-langkah yang sudah dikembangkan secara sistematis serta hasil capaian akhir dari pembelajaran yakni tercapainya pemahaman akan nilai-nilai dan sikap antikorupsi.

1. **Pendidikan anti korupsi di sekolah**

Gerakan melawan korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang bersifat saling mengerti melengkapi:

1. Pendekatan represif, yaitu memproses kasus-kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara hukum; tindakan ini dikawal oleh perangkat hukum meliputi pasal-pasal hukum dan aparat penegak hukum. Pendekatan hukum memang belum mampu menuntaskan banyak kasus korupsi, tetapi diharapkan hukuman bagi pelaku korupsi yang setimpal akan mampu menimbulkan *deterren effect* berupa rasa takut, dan efek jera yang dapat mencegah seseorang dari tindakan korupsi, dikarenakan rasa takut akan hukuman fisik (penjara) maupun sanksi sosial (rasa malu).
2. Pendekatan preventif, yang dapat diimplementasikan dalam dua cara
	1. melakukan perbaikan sistem pada sektor publik maupun sektor swasta, dengan mewujudkan *good governance* yang diharapkan akan mengurangi bahkan menutup peluang terjadinya korupsi. Akan tetapi sistem yang baik tanpa diimbangi dengan kualitas moral para individu yang menjalankan sistem tidak akan menghasilkan output yang menggembirakan. Sehingga muncul upaya (b) yaitu upaya perbaikan moral melalui pendidikan (Sofia dan Haris, 2009).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan nilai-nilai luhur untuk membangun karakter antikorupsi. Pemikiran ini dihasilkan atas dasar asumsi bahwa terjadinya tindak pidana korupsi karena tidak konsistennya kita pada nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang rendah, konsumtif/ingin selalu bermewah-mewah *(hedonis)*, minta dilayani (tidak mandiri), dan mental menerabas. Semua ini akan menimbulkan sikap dan perilaku tidak peduli, tindakan semena-mena, dan berjiwa “pengecut” yang hanya mementingkan jalan pintas. Oleh karena itu, nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan KPK terdiri atas 9 butir seperti pada Tabel 4 (KPK, 2008, dalam Puskurbuk, 2012).

**Table. 3.4 Nilai – Nilai Penidikan Antikorupsi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nilai Etos Kerja | Kerja Keras  | Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan. |
|  | Sederhana  | Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak ria. |
|  | Mandiri | Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. |
| Nilai Sikap  | Adil | Selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. |
|  | Berani | Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. |
|  | Peduli | Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspek Nilai Nilai Antikorupi** | **Deskripsi** |
| Nilai – Nilai Inti Jujur  | Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagi miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga, dan sebagainya. |
| Disiplin  | Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada. |
| Tanggung Jawab | Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik.  |
|  | selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. |

Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama.

Berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Secara khusus, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk.

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (antikorupsi), yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli, dan bermartabat (*dignity)*
2. mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh wawasan kebangsaan yang kuat;
3. menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
4. menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa;
5. menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, dan bertanggung jawab (Puskurbuk, 2012).

Sasaran utama dari pendidikan antikorupsi adalah tumbuhnya budaya antikorupsi (budaya integritas) di kalangan semua warga sekolah, sehingga semua warga sekolah tersebut memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli terhadap penegakan aturan yang berlaku. Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pembangunan kepribadian dari setiap individu.

Upaya tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan dalam arti luas. Hasil pendidikan akan berujung pada kompetensi berpikir, kompetensi bersikap, dan kompetensi bertindak. Atau menurut terminologi taksonomi *Bloom* (1956) hasil pendidikan meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.

antikorupsi dapat melalui penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran.

1. Mata pelajaran yang sesuai
2. Muatan lokal
3. pengembangan diri. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab untuk melakukan aksi berupa pengajaran antikorupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa pada pendidikan dasar dan menengah, dengan sasaran berupa pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Sekretariat Negara, 2011).

Namun demikian, strategi implementasi pendidikan antikorupsi dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran saja tidak cukup, perlu disertai dengan manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian , strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dapat dilakukan melalui:

1. penyelegaraan manajemin berbasis sekolah yang trasfaran, profesional, dan akuntabel;
2. penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilainilai antikorupsi ke dalam pembelajaran.

(a) mata pelajaran yang sesuai,

(b) muatan lokal, dan

(c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006; dan

 3. Partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti pada Diagram.

# F. Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Pada Masa Kini

Nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006, maka implementasinya dalam pembelajaran perlu menerapkan strategi pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran dapat diartikan setiap kegiatan yang dipilih, yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada siswa dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu (Kozma, 1998). Oleh karena itu, strategi implementasi pendidikan antikorupsi dapat melalui penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran:

1. Mata pelajaran yang sesuai.
2. Muatan lokal.
3. Pengembangan diri.

Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab untuk melakukan aksi berupa pengajaran antikorupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa pada pendidikan dasar dan menengah, dengan sasaran berupa pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Sekretariat Negara, 2011).

Namun demikian, strategi implementasi pendidikan antikorupsi dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran saja tidak cukup, perlu disertai dengan manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian , strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dapat dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel.
2. Penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran:
	1. mata pelajaran yang sesuai.
	2. muatan lokal.
	3. pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2013.
3. partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pada diagram 1.

SEKOLAH BERBUDAYA

INTEGRITAS (Anti Korupsi )

Partisipasi masyarakat

Manegemen

Bebasis

Sekolah

(MBS)

Kurikulum integrasi dalam mata pelajaran, muatan lokal dan pengembagan diri

NILAI – NILAI ANTI KORUPSI

Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja keras,

 Sederhana, Mandiri, Adil, Berani Dan peduli.

*Diagram 1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*

1. **Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah**

Penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan semua komponen warga sekolah dalam menciptakan penyelenggaraan manajemen yang professional, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Empat unsur yang terkait dengan manajemen sekolah, yaitu: kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dan komite sekolah, termasuk keluarga peserta didik.

* 1. Kepala Sekolah, Kepala sekolah adalahpendidik (guru) yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin sekaligus manajer satuan pendidikan. Dalam konteks ini, kepala sekolah merupakan tokoh utama yang harus memberdayakan semua unsur warga sekolah, yaitu: guru, peserta didik, dan komite sekolah, termasuk orang tua, dan masyarakat sekitar.

Sebagai seorang pemimpin, maka kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial terutama untuk menyusun program atau mengambil keputusan yang harus diterapkan dalam kelangsungan proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga dituntut untuk dapat memberi keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menyusun administrasi dan program sekolah, menentukan anggaran belanja sekolah, pembagian pelaksanaan tugas, menguasai dan mampu mengambil kebijaksanaan serta keputusan yang bersifat memperlancar dan meningkatkan kualitas pendidikan.

* 1. Guru (Pendidik). Guru yang bertugas di sekolahharus memenuhi standar kompetensi pendidik secara utuh sehingga mampu membimbing dan memberikan teladan kepada peserta didik, membangun komunikasi secara baik dengan sesama guru, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Untuk merealisasikan itu, guru harus mampu bertindak jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, serta terbebas dari perilaku penjiplakan atau plagiat karya orang lain, memanipulasi jumlah jam mengajar, dan tindakan curang lainnya.
	2. Peserta Didik. Peserta didik adalah orang yangpertama terkena dampak semua proses yang terjadi dalam dunia pendidikan. Untuk itu, posisi peserta didik harus menjadi subyek dalam proses pembelajaran sehingga semua kegiatan yang dilakukan di sekolah merupakan upaya dalam memberikan layanan terbaik kepada setiap peserta didik. Peserta didik sebagai pelaku pada setiap kegiatan sehingga memberikan ruang kepada mereka untuk mengalami sendiri terhadap seluruh aktivitasnya.
	3. Keluarga dan Komite Sekolah Komponenkeempat yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan manajemen sekolah adalah keluarga dan komite sekolah. Keluarga peserta didik merupakan mitra bagi sekolah dalam upaya membangun iklim pembelajaran dan manajemen yang sehat. Manajemen sekolah yang sehat dapat dilihat dari keharmonisan hubungan antara semua komponen warga sekolah terutama keluarga dan komite sekolah. Keluarga dan komite sekolah harus paham nilai-nilai apa yang ditanamkan dan diberlakukan di sekolah agar tidak terjadi “*split*” kepribadian anak, misalnya, ketika di sekolah anak diajari kejujuran, maka keluarga di rumah juga harus mendukung upaya itu. Bila keluarga melakukan yang sebaliknya, maka anak akan mengalami kebimbangan dan akan berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya.
1. **Strategi Integrasi dalam Kurikulum 2006**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengauran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikian tertentu (UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah, sehingga istilahnya adalah kurikulum tingkat satuan (2013), yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) serta berpedoman pada Panduan Penyusunan (2013) yang disusun oleh BSNP (BSNP, 2006). SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Termasuk dalam SKL adalah SKL Satuan Pendidikan, SKL Kelompok Mata Pelajaran, SKL Mata Pelajaran, sebagaimana ditetapkan dengan 22Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006. SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran sebagaimana ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22Tahun 2006. Dengan demikian, alur penyusunan kurikulum (2013) dapat digambarkan seperti Diagram 2 di bawah ini.

**SKL Satuan Pendidikan**

 (SD, SMP, SMA, SMK)

**SKL Kelompok Mata Pelajaran**

(Agama dan Akhlak Mulia; Kewarganegaraan dan Kepribadian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Estetika; Jasmani; Olah Raga; dan Kesehatan)

 **SKL Mata Pelajaran**

**SK Mata Pelajaran**

 **KD Mata Pelajaran**

**KTSP (Termasuk Silabus dan RPP)**

*Diagram 2. Alur Penyusunan KTSP*

Strategi implementasi pendidikan antikorupsi dalam KTSP dapat dilakukan melalui penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran yang sesuai, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006. Strategi implementasi pendidikan antikorupsi dalam KTSP seperti pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5. Strategi Implementasi PendidikanAntikorupsi dalam KTSP**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Integrasi dalam mata pelajaran yang sesuai | Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang sesuai dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi yang akan ditanamkan pada peserta didik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. |
| 2. Integrasi dalam mata pelajaran dalam muatan lokal | - Ditetapkan oleh sekolah/daerah - Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah |
| 3. Integrasi dalam kegiatan pengembangan diri | - Pembiasaan dan Pembudayaan:* Pengkondisian,
* Kegiatan rutin,
* Kegiatan spontan,
* Keteladanan,·

- Kegiatan Terprogram:\* Ekstrakurikuler.: Pramuka, PMR, UKS, KIR, Olahraga, Seni,dan OSIS \* Bimbingan Konseling :Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah |

1. Integrasi dalam mata pelajaran: Implementasinilai-nilai antikorupsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi yang akan ditanamkan pada peserta didik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab ke dalam kompetensi yang sesuai pada mata pelajaran tertentu.
2. Integrasi dalam Muatan Lokal: Muatan lokalmerupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Mata pelajaran muatan lokal dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atau membudayakan perilaku antikorupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang ada hubungan dengan perilaku antikorupsi, misalnya nilai-nilai tentang kehidupan yang harmonis yang menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, kerja keras dan sebagainya.
3. Integrasi dalam pengembangan diri

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu melalui pembiasaan dan pembudayaan, serta kegiatan terpogram.

1**. Pembiasaan dan pembudayaan, yang dapat dilakukan melalui:**

a. Pengkondisian, Pengkondisian tidak kalah pentingnya dalam hal pendidikan antikorupsi. Pengkondisian dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya menyediakan kotak barang hilang, kantin kejujuran, dan slogan-slogan yang selalu mengingatkan setiap orang untuk selalu jujur, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Peserta didik perlu dilibatkan dalam pengkondisian ini sehingga mereka ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik, misalnya dalam pengawasan untuk penegakan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan sebagainya.

b. Kegiatan rutin. Kegiatan rutin mencakup semua kegiatan yang secara terusmenerus dan terjadual seperti: upacara bendera, senam, ibadah bersama, pemeliharaan kebersihan, dan kesehatan diri.Kegiatan rutin dapat dimanfaatkan untuk terus menanamkan dan membudayakan nilainilai antikorupsi kepada semua peserta didik, misalnya pada saat upacara bendera tiap hari Senin atau upacara hari-hari besar nasional lainnya. Mereka berbaris secara rapih dan tertib, antri sebelum masuk ke kelas. Proses ini melatih peserta didik untuk selalu disiplin, adil, dan konsisten dengan aturan yang berlaku. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan ini, dapat dilakukan sebuah gerakan yang melibatkan semua elemen sekolah, misalnya dalam bentuk gerakan disiplin, gerakan bersih, atau lomba kebersihan

c. Kegiatan spontan. Kegiatan spontan mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak terjadwal secara khusus, pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan seperti: memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran). Kegiatan spontan juga dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik atas penderitaan orang lain. Dengan melatih hal tersebut setiap saat kepada semua peserta didik, diharapkan akan tumbuh sikap empati sehingga mereka tidak mau merugikan orang lain.

d. Keteladanan. Keteladanan mencakup semua perilaku sehari-hari seperti: jujur, terbuka, peduli, disiplin. Keteladanan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam penanaman nilai pembentuk sikap antikorupsi. Dengan adanya keteladanan dari para guru dan tenaga kependidikan lainnya, peserta didik akan meniru perilaku tersebut, misalnya guru yang selalu jujur, terbuka, peduli, disiplin, secara konsisten. Dalam hal disiplin misalnya, kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik dapat membangun kedisiplinan tanpa disadari. Situasi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh semua komponen masyarakat terutama yang berada di sekitar kehidupan peserta didik sehar-hari, yaitu orang tua atau tokoh masyarakat. Dukungan dan keteladanan dari masyarakat ikut menentukan keberhasilan pendidikan antikorupsi di sekolah.

**2. Kegiatan Terprogram**

Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, dan/atau klasikal, melalui: kegiatan ekstra kurikuler dan bimbingan konseling.

(a) Kegiatan Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh guru dan/atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, misalnya pelatihan kepramukaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah pada penumbuhan kesadaran kepada peserta didik agar memelihara dirinya dari tindakan-tindakan curang dan selalu menghargai atau peduli pada keadaan orang lain. Kegiatan lain seperti pertandingan olah raga juga dapat melatih sportivitas peserta didik. Pada jenjang SMA, peserta didik dapat mulai disiapkan untuk peduli dan responsif dengan fenomena masyarakat melalui pembentukan komunitas pelajar berintegritas.

(b) Bimbingan dan Konseling. Pelayanan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, secara individual, kelompok, dan/atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki.

**3. Partisipasi Masyarakat.**

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah perlu melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua peserta didik, komite sekolah, dan tokoh masyarakat setempat dengan membuat komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpogram dan kontinyu, misalnya dengan sosialisasi melalui koran, majalah, radio, televisi, dan media lainnya, yang memberitakan tentang berbagai tindakan yang termasuk korupsi dan bahwa korupsi merupakan tindakan “aib” yang dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini penting dilakukan untuk mengingatkan masyarakat, karena banyak yang tidak paham tentang tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi.

Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah pada masa yang akan datang Seperti diketahui bahwa program pemerintah pada tahun 2013 akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas, sebagai pengganti Kurikulum 2006. Karakterikstik Kurikulum 2013 berbeda dengan Kurikulum 2006 maupun kurikulum - kurikulum sebelumnya. Perbedaannya antara lain pada pada Struktur Kurikulum 2006 terdiri atas komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri sedangkan pada Struktur Kurikulum 2013 hanya ada komponen mata pelajaran saja. Muatan lokal dapat diinterintegrasikan ke dalam mata pelajaran: seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta prakarya dan kewirausahaan. Sedangkan pengembangan diri diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap sosial dan sikap spiritual.

Nilai-nilai antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam dokumen Kurikulum 2013, yaitu pada KI-1 dan KI-2. KI-1 berisi sikap spiritual, terkait tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa; KI-2 berisi sikap sosial, terkait tujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab (Nuh, 2013). Selain itu, juga ada KI-3 terkait tujuan membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan yang beradab, dan KI-4 terkait tujuan membentuk peserta didik yang memiliki keterampilan menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Guru harus mengembangkan empat kompetensi inti, mulai dari pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik (KI-3). Selanjutnya, berdasar pengetahuan tersebut diharapkan membentuk keterampilan tertentu (KI-4). Kemudian, berdasarkan keterampilan tersebut diharapkan membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain (KI-2), serta sikap tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa (KI-1). Penyusunan Kompetensi Dasar untuk masing-masing mata pelajaran mengacu empat KI tersebut. KI Sekolah Menengah Atas seperti pada Tabel 6 di bawah ini (Kemdikbud, 2013).

*Tabel 6. Kompetensi Inti Sekolah Menengah Atas*

|  |
| --- |
| KOMPETENSI INTI KELAS X |
| 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
 |
| 1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan faktual, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan kebangsaan.
 |

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa yang akan datang (masa penerapan Kurikulum 2013) dapat dilakukan melalui.

1. penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel,
2. implementasi Kurikulum 2013 secara efektif, karena nilai-nilai antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam dokumen Kurikulum 2013,
3. partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

**BAB V
PENUTUP**

**Kesimpulan**

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan baik secara individu atau kelompok, mengambil yang bukan haknya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi dilakukan sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri sendiri tanpa perlu bertanggung jawab terhadap akan penderitaan rakyat. Banyak cara yang dilakukan Pemerintah menjadikan Indonesia yang bersih dari dan jujur dalam berbagai bidang, baik dalam hal kepemimpinan, pendidikan dan lain lain. Namun, untuk mewujudkan Indonesia yang jujur dan bersih dari tindakan korupsi tersebut menjadi agenda yang perlu perhatian dan usaha yang sangat panjang oleh para pemimpin yang sadar akan kejujuran dan bersih dari tindakan korupsi yang mengakar kuat sebagai budaya Indonesia.

Ditinjau dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode diskriptif adalah penelitian untuk membuat pencadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di lapangan yang diteliti (Suryabrata, 2003).

Desain deskriptif ini digunakan untuk menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada, dengan pola survey, case-stydy, causal comparative, corelational, dan developmental (Kasiram, 2008).

Penelitian ini dikonsentrasikan untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dan dapat mengkomunikasikan lebih dari yang dapat dikatakan dengan bahasa yang proposional.

# DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy. J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ruslan, Rusadi. 2010. Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Aira, Fitra dan Hermanto. 2018. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Di Sman 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 6 Nomor 2 Jilid III

Anam ,Much. Arif Saiful. 2015. Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3 Nomor 2

Azmi ,Sri Rezeki Maulina.2020. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pkn Berbasis Project Citizen Di Stmik Royal Kisaran. Journal of Science and Social Research, Volume III Nomor 1

Gurning, Nuriani Laura Malau. 2014. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di Smp Keluarga Kudus. JURNAL TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN Volume 2 No 1

Mahira,Rahma Titis, DKK. Implementasi Nilai Kejujuran Dalam Pendidikan Anti Korupsi Pada Pembelajaran PKn DI SMPN 3 Malang. Universitas Negeri Malang

Manurung,Rosida Tiurma. 2012. Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik. Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11

Sutrisno. 2017. Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2